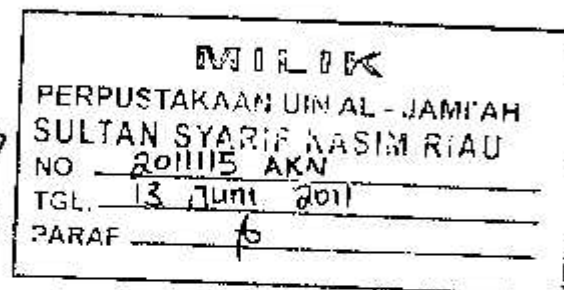


**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO 27 STUDI KASUS
PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA
DESA TELUK MERBAU KABUPATEN SIAK
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Oral Komprehensif Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim



Oleh
NEGA ELVA SAPUTRI
NIM. 10773000057

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : NEGA ELVA SAPUTRI
NIM : 10773000057
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : SI
Judul : Analisis Akuntansi Piutang Menurut PSAK No.27 Studi Kasus Pada
Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau
Kabupaten Siak

DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I


Nasrullah Djamil, SE,MSi,Ak.
NIP. 19780808 200710 1003

Pembimbing II


Mulia Sosiady, SE.MM.Ak.
NIP. 19761217 200901 1014

MENGETAHUI :

Dekan


Drs. Awar Harahap, M.Si.
NIP. 19560202 198403 1002

Ketua Jurusan


Nasrullah Djamil, SE,MSi,Ak.
NIP. 19780808 200710 1003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

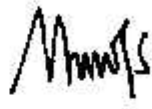
Nama : NEGA ELVA SAPUTRI
NIM : 10773000057
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : S1
Judul : Analisis Akuntansi Piutang Menurut PSAK No.27 Studi Kasus Pada
Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau
Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 12 Mei 2011

PANITIA PENGUJI :

Ketua


Nasrullah Djamil, SE,MSi,Ak.
NIP. 19780808 200710 1003

Sekretaris


Meri Sandora, SE,MM.
NIP. 19790505 200710 2 001

ANGGOTA :

Penguji 1


Nasrullah Djamil, SE,MSi,Ak.
NIP. 19780808 200710 1003

Penguji 2


Ferizal Rachmad, SE,MM.
NIK. 130 707 010

ABSTRAK
ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO 27 STUDI KASUS
PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA DESA TELUK
MERBAU KABUPATEN SIAK
OLEH :

NEGA ELVA SAPUTRI
10773000057

Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan beberapa orang yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Perlakuan akuntansi koperasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian piutang dalam laporan keuangan sesuai PSAK tersebut.

Data penelitian ini didapat langsung dari koperasi berupa data asli yang diubah kembali untuk mengetahui kebenarannya sesuai dengan standar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada pihak koperasi bagian keuangan berupa tanya jawab langsung mengenai bagaimana penerapan akuntansi piutang di koperasi ini. Serta menyimpulkan teori-teori yang terdapat di dalam buku yang berkaitan dengan akuntansi piutang.

Berdasarkan penelitian, koperasi belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 27 yang mana koperasi memasukkan piutang lahan kebun Rp.1.593.473.024 yang merupakan kegiatan normal koperasi ke dalam piutang dana-dana. Dalam pengukuran piutang dagang, koperasi menggunakan metode bruto, tetapi koperasi tidak mendebet potongan penjualan ketika pembeli memanfaatkan potongan tersebut. Koperasi juga tidak memisahkan antara pinjaman anggota dan pinjaman dengan anggota dalam neraca.

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah pihak koperasi harus lebih teliti dalam pengklasifikasian piutang, mana yang merupakan piutang dari kegiatan normal koperasi mana yang tidak, mencatat jurnal sesuai metode yang digunakan, menyajikan neraca dan PHU sesuai dengan format PSAK No.27. Agar perlakuan piutang dan penyajian laporan keuangan sesuai standar, maka SDM perlu juga ditingkatkan untuk masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci : Klasifikasi, Pengukuran, dan Penyajian Piutang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Tiada tutur yang lebih indah dan mulia bagi seorang muslim yang mencintai dan mendambakan keridhoan-Nya, kecuali untaian rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas izin-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG MENURUT PSAK NO 27 STUDI KASUS PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA DESA TELUK MERBAU KABUPATEN SLAK”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak pula kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan teima kasih kepada :

1. Prof. DR.H.M Nazir Karim M.A selaku Rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,
2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,
3. Bapak Nasrullah Djamil SE. Msi, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Pekanbaru sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang memberi pengarahan, waktu dan sumbangan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Mulia Sosiady SE.MM, Ak selaku pembimbing II yang telah membantu dalam pengarahan dalam tata cara penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah banyak memberi ilmu kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan study dengan hasil yang baik. Serta kepada karyawan-karyawati yang banyak membantu penulis dalam setiap urusan perkuliahan.
6. Bapak Fathor, ibu Sri Mulyati dan seluruh karyawan KUD Tunas Muda yang telah memberikan data dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku, ayahanda Suwarjo dan ibunda Paini tersayang, yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku , memberi semangat dan dukungan serta memberi doa yang tulus demi impian dan cita-citaku, dan aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan ayah dan bunda selama ini, (terima kasih banyak aku sangat menyayangi kalian berdua).
8. Mbak Erna ku tersayang dan Kakakku Alfian Bunakes beserta buah hati mereka (Aldi & Ivan comel), Mas Agus & Mbak Atik, terima kasih atas kasih sayang kalian serta dukungan-dukungan yang tak ternilai harganya.
9. Alumni MA Hidayatunnajah Dayun, khususnya untuk Mas Pie-pie q, Mas Iyan, Eni Ernawati, Lia, Sumartini & semuanya, tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian, cayoo...

10. Penghuni Kost Putri Harapan Indah, my best friend Nirwana, Mbak Siti, Novi, Nisa, Pawel, Si Kembar, & Ukhti Wulan, Kost Nia Bersaudara Khususnya Mba' Fat.. terimakasih atas motivasinya.
11. Teman-teman Akuntansi lokal A '07 Umi Riyanti, Diarnie, Yuli Ndut, Yuli Cilik, Ka' Time, Cik Pida, Apri & Wilkin, Sabil, Ruli, Anton, Herman dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini selesai.
12. Teman-teman KKN q di Rantau Baru angkatan 2010, jadikanlah pengalaman itu sebagai suatu proses pembelajaran.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT, serta memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang membantu penulis.

Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya, *amin ya robbal'alamiin*.

Pekanbaru, Mei 2011

Penulis

NEGA ELVA SAPUTRI
10773000057

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
II.1 Pengertian Piutang	10
II.2 Klasifikasi Piutang	13
II.3 Pengakuan Piutang	16
II.4 Pengukuran Piutang	17

II.5 Penilaian Piutang.....	22
II.6 Penyajian dan Pengungkapan Piutang	28
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	34
III.1 Sejarah Singkat Koperasi	34
III.2 Struktur Organisasi Koperasi	35
III.3 Aktivitas Umum Koperasi	44
III.4 Azas dan Tujuan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
IV.1 Pengklasifikasian Piutang	46
IV.2 Pengukuran Piutang	47
IV.3 Penyajian Piutang.....	50
BAB V PENUTUP	55
V.1 Kesimpulan.....	55
V.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa transportasi, jasa asuransi dan jasa lainnya. Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Perlakuan akuntansi koperasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar penyusunan laporan keuangan koperasi dikenal dengan PSAK No. 27 yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar susunan dan penyajian laporan keuangannya. Di dalam PSAK No. 27 juga dijelaskan bahwa “ *Hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak tertera secara khusus diatur dalam pernyataan ini termasuk akuntansi untuk unit usaha otonom koperasi, harus diberlakukan dengan mengacu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya*”

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi ini, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan secara tidak langsung dapat memperbaiki kehidupan masyarakat melalui karya yang dilakukan bersama. Karena itu seharusnya anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Koperasi melakukan kegiatan usahanya melalui sistem jaringan koperasi, sehingga banyak terdapat keterkaitan yang erat antara anggota koperasi dengan koperasi lainnya. Koperasi yang didirikan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Dalam menjalankan usahanya koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit usaha yang berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan koperasi.

Koperasi dikelola oleh seorang pengurus yang dipilih oleh anggota dalam suatu rapat anggota, dengan kata lain kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Pengurus wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang ada dalam koperasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari aspek keuangan yang terpenting yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengurus kepada anggota koperasi.

Laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu perkiraan yang ada dalam neraca koperasi adalah piutang. Piutang adalah hasil dari transaksi penyerahan barang atau jasa kepada anggota maupun bukan anggota koperasi. Menurut PSAK No 27 penyajian piutang, biasanya di bagi menjadi dua bagian yaitu piutang kepada anggota dan piutang kepada non anggota, hal ini dilakukan untuk mempermudah pengidentifikasian pendapatan anggota yang berasal dari penjualan kredit kepada anggota atau bukan anggota.

Pada umumnya item piutang merupakan salah satu pos yang cukup besar nilainya dalam koperasi. Ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan dalam hal

mengatur masalah pokok akuntansi piutang meliputi : (1) pengklasifikasian piutang (2) pengakuan dan pengukuran piutang, (3) penilaian piutang, (4) penghapusan piutang, (5) penyajian piutang dalam laporan keuangan. Kekeliruan dalam pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengakibatkan kesalahan dalam menilai kinerja koperasi yang berdampak kepada penilaian kemampuan pengurus koperasi. Pengakuan, pengukuran dan penyajian pos yang ada dalam laporan keuangan harus disesuaikan dengan standar keuangan koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda berkedudukan di Desa Teluk Merban Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Koperasi ini merupakan koperasi primer yang mempunyai unit usaha bervariasi, antara lain : Penjualan WASERDA, Penjualan Pupuk, Jasa Angkutan dan Tandan Buah Segar (TBS), Jasa Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Umum (photo copy). Dalam menyusun laporan keuangan KUD Tunas Muda belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian pos yang ada dalam neraca khususnya piutang.

Permasalahan pertama adalah, piutang lahan kebun yang berjumlah Rp. 2.089.773.024 di masukkan ke dalam piutang dana-dana sebesar Rp. 1.593.473.024 dan sisanya Rp. 496.300.000 di masukkan ke dalam piutang usaha. Dari keterangan karyawan KUD tersebut, piutang lahan kebun merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi khusus untuk pembelian kebun kelapa sawit dan termasuk Usaha Simpan Pinjam (USP). Hal ini berakibat

penyajian piutang usaha (anggota) di neraca menjadi terlalu kecil. Menurut PSAK No.27 dijelaskan bahwa harus ada pengklasifikasian antara piutang anggota dan piutang non anggota. Untuk itu, seharusnya seluruh jumlah piutang lahan kebun yang berjumlah Rp.2.089.773.024 di masukkan ke dalam piutang anggota.

Permasalahan kedua terjadi pada unit waserda. Untuk mendorong langganan koperasi khususnya non anggota dan bagi anggota yang melakukan pembayaran sendiri agar dapat melunasi kewajibannya lebih cepat, maka koperasi memberikan potongan tunai dengan syarat 5/10, n/30 pada bagian penjualan khususnya alat bangunan. Tetapi penulis masih menemukan kesalahan dalam pengukuran piutang. Berikut ini adalah salah satu contoh transaksi penjualan kredit pada unit waserda.

Pada tanggal 13 Agustus 2009 Bapak Ahmad anggota dari koperasi, yang memutuskan untuk melakukan pembayaran sendiri membeli bahan bangunan dengan syarat 5/10, n/30 sejumlah Rp.3.000.000. Pencatatan yang dilakukan koperasi saat penjualan adalah dengan mendebet piutang sebesar Rp.3.000.000 dan mengkredit penjualan sebesar Rp.3.000.000.

Pada saat pelunasan dimasa diskon, koperasi mendebet kas sebesar Rp.2.850.000 dan mengkredit piutang sebesar Rp.2.850.000. Sementara selisih piutang sebesar Rp.150.000 dihapus dengan mendebet penjualan dan mengkredit piutang. Jika pelunasan dilakukan di luar masa diskon maka pencatatan yang dilakukan adalah mendebet kas sebesar Rp.3.000.000 dan mengkredit piutang sebesar Rp.3.000.000.

Dari pencatatan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa koperasi menggunakan metode bruto, tetapi dalam pengaplikasiannya masih terjadi kekeliruan. Akibatnya SHU yang dihasilkan terlalu tinggi. Seharusnya pada metode bruto potongan penjualan dicatat pada saat uang diterima dengan menjurnal kas sebesar Rp.2.850.000 (debit), potongan penjualan Rp.150.000 (debit) dan piutang dagang Rp.3.000.000 (kredit).

Permasalahan yang ketiga adalah dalam penyajian piutang, KUD Tunas Muda tidak memisahkan antara piutang anggota dan non anggota. Dapat di lihat pada neraca KUD Tunas Muda hanya di sajikan piutang usaha dan piutang dana-dana. Selain itu dalam daftar piutang telah jelas terdapat debitur Desa Teluk Merbau, debitur Desa Banjar Seminai, Merangkai, SP, Lubuk Tilan dll. Padahal yang menjadi anggota dari KUD Tunas Muda sebagian besar warga Desa Teluk Merbau. Akibatnya anggota KUD tersebut tidak bisa menilai manfaat dengan menjadi anggota koperasi dan tidak dapat mengukur kinerja atau efesicnsi kegiatan koperasi. Selain itu juga menyebabkan tidak ada pemisahan antara partisipasi anggota dan non anggota pada penyajian Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Pencatatan yang seperti ini tidak sesuai dengan PSAK 27 paragraf 65b bagian IV yang berbunyi *"Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota."* Menurut pasal tersebut piutang anggota dan non anggota harus dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG**

MENURUT PSAK NO 27 STUDI KASUS PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA DESA TELUK MERBAU KABUPATEN SLAK"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Apakah akuntansi piutang telah dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum?".

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun telah menerapkan akuntansi piutang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

1.3.2 Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis mengenai akuntansi piutang
- b. Bagi pihak pengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam penyajian laporan keuangannya.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

1.4.2 Jenis Data

- a. Data Primer, data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian yang berupa penjelasan lisan dengan pengurus dan karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Teluk Merbau.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari data dan informasi yang sudah diolah oleh perusahaan berupa laporan keuangan, daftar piutang, struktur organisasi dan sejarah perusahaan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang dan memperoleh informasi serta data yang akurat terhadap penelitian ini digunakan metode penelitian yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pengurus dan karyawan untuk memperoleh informasi mengenai perlakuan piutang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau.

b. Dokumentasi

Mengutip secara langsung dari Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau.

c. Penelitian Pustaka

Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bahan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu membahas data dengan menyeluruh berdasarkan kenyataan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada untuk mendukung dalam pembahasan ini sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Travers dalam Husein Umar (2003:55) metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini, penulis membagi dalam lima bab yang dirinci ke dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Menguraikan teori yang mendukung pembahasan penelitian ini seperti pengertian piutang, pengklasifikasian piutang, pengakuan dan penyajian piutang dalam laporan keuangan koperasi.

- BAB III** : Menjelaskan tentang gambaran umum koperasi yang meliputi sejarah koperasi, struktur organisasi dan jenis usaha yang dilakukan.
- BAB IV** : Menguraikan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai pengklasifikasian piutang, pengukuran piutang, penyajian piutang dan pengungkapan dalam laporan keuangan KUD Tunas Muda.
- BAB V** : Merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Piutang

a. Pengertian Piutang Menurut Para Ahli

Ada beberapa pengertian piutang yang dikemukakan oleh beberapa penulis, diantaranya adalah:

Menurut Warren (2005 : 392) piutang dagang adalah :

"Penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit yang normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek.

Sementara itu Jumingan (2006:18) memberikan pengertian piutang sebagai berikut :

"Meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit."

Pengertian piutang lain yang dikemukakan oleh Simamora dalam Nartikarois (2009:17) adalah :

"Klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atas jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan dimana suatu pihak terutang kepada pihak lainnya."

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa piutang merupakan klaim atau tuntutan perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok atas jasa yang telah diserahkan yang

diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan uang dimasa yang akan datang.

b. Pengertian Piutang Menurut Pandangan Islam

Piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan menambah nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit banyak digunakan dalam dunia perbankan.

Sedangkan dalam terminology fiqh mu'amalah, hutang piutang disebut dengan "dain". Istilah "dain" ini juga sangat terkait dengan istilah "qard" yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan pinjaman. Menurut Rizal, Aji dan Ahim (2009:326) qardh adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat.

Dalam transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian hutang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha menolong sesama dalam kebaikan.

Dalam transaksi hutang piutang, Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang

piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَتَخَسَّنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَقُّ إِلَّا تَرَاقَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

Maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

II.2 Klasifikasi Piutang

Piutang digolongkan dalam dua katagori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan kredit atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu terjadinya.

Menurut Drs.Amin (2002:115) pos-pos piutang pada koperasi lazimnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa kepada para anggota, sehubungan dengan program penyaluran barang atau dana kredit dari pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.
2. Piutang yang timbul karena produk atau penyerahan jasa kepada bukan anggota dengan program penyaluran barang atau dana kredit dari pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.

3. Piutang kepada koperasi lain yang timbul sehubungan dengan transaksi-transaksi yang menyangkut program pemerintah dibidang pengadaan dan penyaluran produk. Pencairan sebagian atau seluruh piutang ini di luar wewenang koperasi yang berpiutang. Di samping itu, transaksi/dana yang mengakibatkan timbulnya piutang ini dilakukan/disimpan oleh koperasi lain. Piutang semacam ini lebih bersifat sebagai aktiva yang dititipkan pada koperasi lain, yang pencairannya diatur oleh pihak lain. Contoh dari piutang ini adalah piutang dana pengembangan.
4. Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan tertentu.

Pengklasifikasian piutang dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dapat ditinjau dari:

a. Pengklasifikasian Piutang Menurut Sumber Terjadinya

1. Piutang Dagang

Menurut Bodnar George (2003 : 381) Piutang dagang merupakan dana yang terutang oleh pelanggan atas barang atau jasa yang telah di jual atau diserahkan kepada mereka secara kredit.

Dalam kegiatan oprasi perusahaan yang normal, biasanya piutang dagang akan dihunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar dan biasanya memiliki jumlah yang besar pada neraca perusahaan.

2. Piutang Bukan Dagang (Piutang Lain-Lain)

Piutang bukan dagang biasanya merupakan klaim atau tagihan kepada pihak lain atas transaksi di luar kegiatan normal perusahaan. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari setahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi.

Yang termasuk dalam piutang bukan dagang menurut Rudianto (2009:225) antara lain :

- a. Persekot dalam kontrak pembelian
- b. Klaim terhadap perusahaan pengangkutan untuk barang-barang rusak atau hilang
- c. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian-kerugian yang dipertanggungjawabkan.
- d. Klaim terhadap karyawan perusahaan
- e. Klaim terhadap restitusi pajak
- f. Piutang Deviden
- g. Dll

b. Pengklasifikasian Piutang Menurut Bentuk Perjanjian

1) Piutang Wesel (Wesel Tagih)

Yaitu suatu janji tertulis yang tidak bersyarat dari seseorang kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. James M. Reeve dkk (2009:438) mengemukakan pengertian wesel sebagai berikut:

Wesel tagih adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca.

Menurut Horngren dan Harrison (2007:436) Wesel tagih (*notes receivables*) bersifat lebih formal ketimbang piutang usaha, karena juga memasukkan beban bunga. Dalam wesel tagih, debitor berjanji untuk membayar kreditor suatu jumlah tertentu pada tanggal tertentu di masa depan-tanggal *jatuh tempo* (*maturity date*). Suatu dokumen tertulis yang dikenal sebagai *surat promes* (*promissory note*) berperan sebagai bukti. Wesel tagih yang jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang merupakan *aktiva lancar*, sementara yang jatuh temponya melebihi satu tahun merupakan *aktiva jangka panjang*.

2) Piutang Bukan Wesel

Meliputi semua piutang yang didukung oleh janji atau kesanggupan tertulis untuk membayar piutang tersebut pada tanggal tertentu. Piutang bukan wesel ini umumnya hanya disebut piutang saja.

II.3 Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang artinya kapan suatu penjualan kredit diakui sebagai piutang. Dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan syarat penyerahan

barang yang diterapkan oleh perusahaan untuk penjualan barangnya. Menurut Jasmina (2008:71) terdapat dua syarat penyerahan barang yaitu:

a. F.O.B shipping Point

Free On Board Shipping Point merupakan syarat penyerahan barang dimana hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada saat penjual menyerahkan barang tersebut di depan gudang penjual. Ini berarti, pembeli yang menanggung biaya transportasi dan harus ditambahkan ke harga pokok persediaan dengan mendebit persediaan barang dagangan.

b. F.O.B Destination

Free On Board Destination merupakan syarat penyerahan barang dimana hak kepemilikan barang akan berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli ketika barang tersebut telah sampai ke tempat pembeli, seluruh resiko serta biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Jadi pada saat penyerahan barang ini piutang akan diakui atau penjualan dianggap terjadi pada saat barang telah sampai di gudang pembeli yang dibuktikan dengan slip penerimaan dari pembeli tersebut.

II.4 Pengukuran Piutang

Piutang dagang pada saat terjadinya dikenal berdasarkan nilai tukar dari aktiva yang dijual atau berdasarkan harga jual yang tertera pada faktur penjualan. Namun harga jual tersebut perlu diukur berapa yang mungkin dapat terealisasi menjadi kas.

Kusnadi (2003:487), menyatakan "*Piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan akan diakui pada saat hak milik atas barang berpindah dari penjual ke pembeli*".

Pengakuan terhadap piutang dagang bertujuan untuk menentukan jumlah pendapatan yang sewajarnya untuk setiap periode dengan cara menentukan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mengukur nilai tunai piutang dagang, maka diperlukan pengurangan piutang dagang yang diperkirakan tidak tertagih dari jumlah keseluruhan piutang dagang yang ada pada suatu perusahaan. Terdapat berbagai elemen yang mengakibatkan tidak seluruh harga jual di dalam transaksi penjualan kredit tanpa dibebankan pada pelanggan. Setiap elemen yang mengakibatkan tidak keseluruhan harga jual dapat dibebankan dan ditagih kepada pembeli, harus diperlakukan sebagai pengurangan terhadap hasil penjualan.

Adapun elemen-elemen yang harus dikurangkan dari hasil penjualan tersebut adalah :

a) Potongan dagang (*Trade Discount*)

Potongan dagang diberikan oleh perusahaan untuk pelanggan yang membeli produknya dalam jumlah cukup besar. Potongan dapat bervariasi tergantung volume usaha dan besar kecilnya pesanan pelanggan. Dengan kata lain potongan dagang diberikan menurut jumlah kuantitas yang dibeli pelanggan.

Menurut Jasmina (2008:72) penjual dan pembeli tidak mencatat daftar harga barang dan diskon barang atau rabat dalam akun-akun. Piutang dicatat sebesar harga jual bersih yang benar-benar diberikan kepada pelanggan, yaitu harga jual kotor dikurangi suatu jumlah yang ditetapkan sebagai potongan dagangan (biasanya dalam persentase).

b) Potongan Tunai atau Potongan Penjualan (*Cash Discount*)

Skousen, Albert, dan Stice (2001:302) mengungkapkan bahwa dalam beberapa transaksi penjualan, pembeli diberikan potongan jika tagihan dibayar tepat. Rangsangan untuk membayar cepat di sebut potongan penjualan, atau potongan kas dan istilah potongan ini dinyatakan dalam bentuk singkatan.

Jika pelanggan memanfaatkan potongan tunai atau potongan penjualan ini, maka potongan penjualan akan didebitkan sebesar selisih kas yang didebitkan dengan piutang dagang yang dikreditkan. Syarat yang perlu diperhatikan dan dapat dipergunakan untuk menghitung potongan tunai adalah ketentuan potongan yang diberikan, seperti 2/10, n/30 yang berarti:

- a. Pembayaran dilakukan setelah 30 hari setelah tanggal penjualan (n/30).
- b. Apabila si pembeli bisa membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, paling lambat 10 hari setelah pembelian, maka dapat diberikan potongan 2%.

Dalam penggunaan metode kotor maka potongan penjualan harus dilaporkan sebagai pengurangan atas penjualan di dalam perhitungan laba rugi. Pada metode ini potongan penjualan diakui pada saat pembayaran diterima dalam periode potongan.

Jika metode bersih yang digunakan maka piutang dan penjualan dicatat sebesar nilai bersih. Setiap potongan penjualan yang tidak dimanfaatkan oleh pembeli dicatat pada saat pembeli melakukan pelunasan lewat dari periode potongan. Sebagai gambaran dapat diperhatikan contoh berikut:

Tabel II.1
Jurnal Menurut Metode Kotor dan Metode Bersih

Metode Kotor		Metode Bersih	
Penjualan senilai \$ 10.000, syarat 2/10, n/30			
<i>Piutang usaha</i>	\$ 10.000	<i>Piutang usaha</i>	\$ 9.800
<i>Penjualan</i>	\$ 10.000	<i>Penjualan</i>	\$ 9.800
Pembayaran sebesar \$ 4.000 diterima dalam periode diskon			
<i>Kas</i>	\$ 3.920	<i>Kas</i>	\$ 3.920
<i>Potongan penjualan</i>	\$ 80	<i>Piutang usaha</i>	\$ 3.92
<i>Piutang usaha</i>	\$ 4.000		
Pembayaran sebesar \$ 6.000 diterima setelah periode diskon			
		<i>Piutang usaha</i>	\$ 120
		<i>Pot penjualan yg tak dimanfaatkan</i>	\$ 120
<i>Kas</i>	\$ 6.000	<i>Kas</i>	\$ 6.000
<i>Piutang usaha</i>	\$ 6.000	<i>Piutang usaha</i>	\$ 6.000

Sumber : Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jilid satu, Terjemahan Emil Salim, SE, Penerbit Erlangga, Jakarta 2002, hal 388

c) **Piutang tak tertagih**

Piutang yang tidak tertagih akan dicatat sesuai dengan metode yang dipakai. Menurut Pahala Nainggolan (2006:56) dua metode yang sering dipakai adalah:

1. Penghapusan Langsung (*direct write off*)
2. Pembentukan cadangan/penyisihan (*allowance for doubtful account*)

Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka tidak ada jurnal yang dilakukan sampai suatu perkiraan spesifik secara pasti telah ditetapkan sebagai tak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkreditkan piutang dagang dan mendebitkan beban piutang tak tertagih. Lain halnya apabila perusahaan menggunakan metode penyisihan,

maka piutang tak tertagih ditaksir dan disisihkan dengan mendebitkan perkiraan beban piutang tak tertagih dan mengkreditkan penyisihan ragu-ragu.

d) Return Penjualan dan Pengurangan Harga

Lili M. Sadeli (2002:100) memberikan pengertian mengenai return penjualan sebagai berikut : Barang dagangan yang telah dijual akan dikembalikan lagi oleh pelanggan dengan alasan barang tersebut cacat atau karena alasan lain.

Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti kerusakan barang selama pengiriman, atau kesalahan pengiriman barang baik secara kualitas maupun mrccknya. Penjual akan mencatat return penjualan dan pengurangan harga dan mengkreditkan perkiraan piutang dagang. Menurut Lili M. Sadeli (2006:102) saldo perkiraan retur penjualan dianggap mengurangi jumlah total penjualan. Di dalam daftar rugi/laba yang akan disusun, saldo kredit perkiraan penjualan dikurangi dengan saldo debet perkiraan retur penjualan.

e) Biaya Transportasi

Di dalam mengambil keputusan untuk transaksi penjualan disamping menetapkan harga, turut pula ditentukan persetujuan yang menyangkut masalah yang akan menanggung biaya angkut pengiriman barang. Untuk menentukan siapa yang akan menanggung biaya angkut pengiriman barang, biaya didasarkan pada syarat penyerahan barang. Syarat-syarat penyerahan barang yang mungkin dilakukan menurut Jasmina (2008:70) adalah :

1. *F.O.B Shipping Point*
2. *F.O.B Destination*

11.5 Penilaian Piutang

Untuk tujuan pelaporan, menurut Soemarso (2004 : 338) piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang.

Penilaian piutang berarti menerapkan berapa nilai piutang tersebut dilaporkan di neraca. Piutang harus dinilai dan dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan atau nilai kas yang diharapkan.

Adakalanya dapat dipastikan piutang kepada seorang debitur tertentu tidak dapat ditagih lagi maka piutang tersebut harus dihapuskan dari pembukuan oleh perusahaan. Sebagai akibat dari penghapusan piutang langganan tersebut, maka saldo piutang tidak muncul lagi dalam rincian piutang, yang artinya bahwa saldo piutang tersebut dikeluarkan dari catatan piutang perusahaan dengan cara mengkreditnya.

Ada dua metode yang di gunakan untuk menilai piutang yang diperkirakan tidak tertagih, yaitu :

a. Metode langsung

Warren (2005 :401) menjelaskan bahwa :

"Metode penghapusan langsung (direct write -off method), mengakui bahwa beban hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Jadi akun penyisihan dan ayat jurnal penyesuaian tidak diperlukan pada akhir periode."

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 26 April 2003 piutang terhadap Tuan Hamid sebesar Rp. 100.000,00 yang berasal dari penjualan barang dagangan tahun 2002 yang ternyata benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Karena yang

bersangkutan telah dinyatakan valid. Jurnal untuk mencatat kasus ini adalah sebagai berikut :

Beban piutang tak tertagih *Rp. 100.000,00*

Piutang Usaha *Rp. 100.000,00*

Jika pelanggan ternyata membayar piutang yang telah di hapus itu dikemudian hari, maka piutang harus ditimbulkan kembali dengan membalik ayat jurnal penghapusan sebelumnya.

Pada tanggal 19 Agustus 2003 ternyata Tuan Hamid membayar hutangnya sebesar Rp. 60.000,00. Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat kejadian di atas :

Piutang dagang *Rp. 60.000,00*

Beban piutang tak tertagih *Rp. 60.000,00*

(mencatat pengakuan kembali piutang yang telah di hapus)

Kas *Rp. 60.000,00*

Piutang usaha *Rp. 60.000,00*

(mencatat pelunasan piutang)

b. Metode Tidak Langsung (Penghapusan Akun Penyisihan)

Menurut Keiso dan Weygandt (2002:390) dalam metode ini suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode di mana penjualan itu dicatat.

Ayat jurnal yang digunakan dalam metode penyisihan adalah sebagai berikut:

Beban piutang tak tertagih xxx

Penyisihan piutang tak tertagih xxx

Menurut James M. Reeve dkk (2009:444) terdapat dua metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode. Estimasi tersebut dapat dibuat berdasarkan:

1. Persentase penjualan
2. Analisis piutang

1) Persentase penjualan

Penyisihan piutang dilakukan dengan mengalikan sejumlah persentase tertentu dengan hasil penjualan bersih, dimana penjualan bersih adalah penjualan kredit bersih mengingat piutang timbul dari penjualan kredit. Contoh :

Pada tanggal 31 Desember 2006 PT. DOMISKA menaksir piutang tak tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih, dimana total penjualan sebesar Rp.50.000.000,00. Maka penyisihan piutang tak tertagihnya adalah Rp.1.000.000,00.

Ayat jurnalnya adalah :

Beban piutang tak tertagih Rp.1.000.000,00

Penyisihan piutang tak tertagih Rp.1000.000,00

Perhitungan :

$$2\% \times \text{Rp.}50.000.000,00 = \text{Rp.}1.000.000,00$$

Untuk menentukan besarnya persentase dapat dihitung berdasarkan perbandingan rata-rata antara jumlah piutang yang tak tertagih dengan total

penjualan kredit selama beberapa tahun yang lalu. Hal ini bisa di lihat dari data penyisihan piutang tak tertagih selama lima tahun terakhir:

Total penjualan bersih = Rp 64.000.000

Total penjualan kredit bersih = Rp 21.000.000

Total piutang tak tertagih = Rp 637.000.

Berdasarkan data tersebut, maka besarnya persentase penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Persentase penyisihan piutang dari total penjualan bersih

$(Rp\ 637.000 : Rp\ 64.000.000) \times 100\% = 1\%$

Persentase penyisihan piutang dari penjualan kredit bersih

$(Rp\ 637.000 : Rp\ 21.000.000) \times 100\% = 3\%$

Cara menaksir besarnya penyisihan piutang berdasarkan persentase tertentu dari hasil penjualan bersih (total penjualan bersih ataupun penjualan kredit bersih) tersebut menggunakan pendekatan laba rugi.

2) Metode Analisis piutang

Metode ini menyediakan estimasi yang cukup akurat menyangkut nilai piutang yang dapat direalisasi. Estimasi persentase kerugian yang dikembangkan untuk masing-masing kategori didasarkan pada pengalaman kerugian masa lalu. Sebuah perusahaan dapat mengestimasi persentase piutang beredarnya yang tidak akan tertagih. Persentase kerugian yang ditetapkan masing-masing perusahaan tidak sama. Sehubungan dengan metode analisa umur piutang ini Smith dan Skousen (2000:92) dalam bukunya menyatakan bahwa:

"Metode yang paling lazim digunakan untuk menetapkan penyisihan berdasarkan piutang usaha yang beredar adalah melalui penetapan umur

piutang (aging receivables). Masing-masing piutang dianalisis untuk menetapkan piutang mana yang belum dan mana yang sudah jatuh tempo, piutang yang telah jatuh tempo diklasifikasikan menurut berapa lama piutang tersebut telah jatuh tempo”.

Dalam metode ini piutang dikelompokkan berdasarkan lama waktu tunggakan disertai dengan persentase kerugian piutangnya, semakin lama piutang melewati tanggal jatuh temponya semakin besar pula persentase kemungkinan piutang tak tertagihnya. Kemudian piutang yang sudah dikelompokkan menurut umurnya, lalu dihitung penyisihannya dengan mengalikan persentase yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain metode umur piutang adalah sebagai penyisihan piutang yang disesuaikan ke suatu jumlah yang ditentukan oleh umur piutang. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2002 terdapat saldo piutang PT Risa Fadila sebesar Rp 7.500.000,00 dan saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp10.000,00 (kredit). Jumlah saldo piutang untuk masing-masing langganan serta pembagian skala waktu ditetapkan perusahaan seperti pada contoh tabel berikut:

Tabel II.2
Analisa Umur Piutang PT. Risa Fadila
31 Desember 2005

Nama	Jumlah Piutang	Belum jatuh tempo	Lewat 1-30 hari	Lewat 31-60 hari	Lewat 61-90 hari	Lewat 91-180 hari	Lewat 181-365 Hari	Lebih dari satu bulan
Alek	270.000	250.000	20.000					
Basri	500.000	500.000						
Toko Indah	320.000	250.000	30.000	40.000				
CV Jaya	1.410.000	1.300.000		110.000				
PT Muda	1.200.000	1.200.000						
Alaska & Co	180.000	-						180.000
Mulyono	600.000	400.000				200.000		
UM Maja	400.000	400.000						
PT Sinar	1.000.000	800.000		100.000	100.000			
Tagrif	350.000	100.000	250.000					
Manan	250.000	-					250.000	
UD Sari	320.000	200.000				120.000		
Toko Mifta	50.000	-			50.000			
UD Polka	650.000	600.000	50.000					

Jumlah	7.500.000	6.000.000	350.000	250.000	150.000	320.000	250.000	180.000
--------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber : Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hal. 130

Tabel II.3
Taksiran Kerugian Piutang PT. Risa Fadila
31 Desember 2005

Kelompok umur	Jumlah	Persentase kerugian piutang	Taksiran kerugian piutang
Belum menunggak	6.000.000	0,50	30.000
Menunggak 1-30 hari	350.000	1,00	3.500
Menunggak 31-60 hari	250.000	2,00	5.000
Menunggak 61-90 hari	150.000	5,00	7.500
Menunggak 91-180 hari	320.000	10,00	32.000
Menunggak 181-365 hari	250.000	30,00	75.000
Menunggak lebih 1 tahun	180.000	50,00	90.000
	7.500.000		243.000

Sumber : Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hal. 130

Apabila neraca saldo menunjukkan rekening Cadangan Kerugian Piutang dengan saldo kredit sebesar Rp 10.000,00 maka kerugian piutang yang dibebankan tahun 2005 sebagai berikut :

Jumlah kerugian piutang = Rp 243.000,00

Cadangan kerugian piutang = Rp 10.000,00

Kerugian piutang yang dibebankan = Rp 233.000,00

Jurnal untuk mencatat kerugian piutang tanggal 31 Desember 2005 dan rekening cadangan kerugian piutang adalah:

Kerugian piutang tak tertagih Rp 233.000,00

Cadangan kerugian piutang tak tertagih Rp 233.000,00

Menurut Lyn M. Fraser (2008:72) harus ada hubungan yang konsisten antara tingkat perubahan penjualan, akun piutang usaha, dan akun penyisihan piutang tak tertagih. Jika jumlah tersebut bergerak secara signifikan dengan tingkat yang berbeda atau dengan arah yang berlawanan, misalnya penjualan

dan piutang usaha bertambah, tetapi penyisihan piutang tak tertagihnya berkurang atau bertambah dengan tingkat yang lebih kecil, maka mungkin saja terjadi manipulasi.

Dari dua metode di atas, metode penyisihan atau cadangan dinilai lebih tepat digunakan untuk menghitung kerugian akibat piutang tak tertagih. Karena dalam metode cadangan setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Jumlah piutang yang dilaporkan di neraca adalah sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Sedangkan dalam metode penghapusan langsung tidak ada penaksiran jumlah kerugian piutang, jumlah yang dicatat haruslah fakta dan bukan estimasi. Piutang tak tertagih dicatat pada tahun dimana diputuskan bahwa suatu piutang tertentu benar-benar tidak akan dapat ditagih. Sehingga pada periode yang bersangkutan tidak melaporkan piutang dengan jumlah yang diharapkan dapat ditagih, maka di neraca akan menunjukkan jumlah bruto piutang.

II. 6 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Komponen-komponen neraca menurut Sofyan (2005:216) dapat digolongkan sebagai berikut :

AKTIVA :

- a) Aktiva lancar
- b) Investasi (penyerahan)
- c) Aktiva tetap
- d) Aktiva yang tidak berwujud

e) Aktiva lain-lain

Piutang disajikan dalam neraca dalam kelompok aktiva lancar, piutang disajikan setelah perkiraan kas dan bank, surat-surat berharga yang mudah dan tidak dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan, deposito jangka pendek, wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Penggunaan istilah piutang juga harus tepat sesuai dengan usaha yang dijalankan. Menurut Nafaria (2004:446) istilah piutang dagang hanya cocok digunakan pada perusahaan dagang, sedangkan piutang usaha dan utang usaha dapat dipergunakan untuk semua jenis perusahaan.

Piutang dilaporkan di dalam neraca sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 09

“Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat di tagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan peryisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”.

Agar dapat suatu gambaran yang jelas, maka contoh penyajian piutang didalam neraca dapat dilihat pada gambar berikut:

PENYAJIAN PIUTANG DALAM NERACA

Kas

Piutang dagang Rp. 12.250

Penyisihan piutang tak tertagih Rp. (350)

Piutang dagang (netto) Rp. 11.935

Sumber, Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 1, Edisi 5, Hal : 338

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.10) Laporan keuangan koperasi menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat :

- a) *Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :*
 - 1) *Pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan bukan anggota*
 - 2) *Kebijakan akuntansi tentang aktiva aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya*
 - 3) *Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan bukan anggota*
- b) *Pengungkapan informasi lain, antara lain :*
 - 1) *Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek atau yang telah dicapai oleh koperasi*
 - 2) *Akuntansi koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pelatihan usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota*
 - 3) *Ikutan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota*
 - 4) *Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota*
 - 5) *Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan*
 - 6) *Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi*
 - 7) *Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta*
 - 8) *Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan*
 - 9) *Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan*
 - 10) *Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan*

Adapun format yang ada pada PSAK No. 27 adalah :

TABEL IV.3
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

ASET	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS 20X1	20X0
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan Bank	Rp xxx	Rp xxx	Utang Usaha	Rp xxx Rp xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx	Utang Bank	xxx xxx
Piutang Usaha	xxx	xxx	Utang Pajak	xxx xxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxx	xxx	Utang Simpanan Anggota	xxx xxx
Piutang Pinjaman Non Anggota	xxx	xxx	Utang Dana Bagian SHU	xxx xxx
Piutang Lain-lain	xxx	xxx	Utang Jangka Panjang	
Peny. Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)	akan jatuh tempo	xxx xxx
Persediaan	xxx	xxx	Biaya Harus Dibayar	xxx xxx
Pendapatan Akan Diterima	xxx	xxx	Jml. Kwj. Jangka Pendek	Rp xxx Rp xxx
Jumlah Aset Lancar	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>		
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Penyertaan pada Koperasi	Rp xxx	Rp xxx	Utang Bank	Rp xxx Rp xxx
Penyertaan pada non Kop	xxx	xxx	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx xxx
Jumlah Investasi jangka Panjang	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>	Jumlah kewajiban Jangka panjang	<u>Rp xxx</u> <u>Rp xxx</u>
ASET TETAP			EKUITAS	
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxx	Rp xxx	Simpanan Wajib	Rp xxx Rp xxx
Bangunan	xxx	xxx	Simpanan Pokok	xxx xxx
Mesin	xxx	xxx	Modal Penyetaraan	
Inventaris	xxx	xxx	Partisipasi Anggota	xxx xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)	Modal Penyertaan	xxx xxx
Jumlah Aset Tetap	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>	Modal Sumbangan	xxx xxx
ASET LAIN-LAIN			Cadangan	xxx xxx
Ak. Tetap dalam Konstruksi	Rp xxx	Rp xxx	SHU Belum Dibagi	xxx xxx
Beban Ditangguhkan	xxx	xxx	Jumlah Ekuitas	<u>Rp xxx</u> <u>Rp xxx</u>
Jumlah Aset Lain-lain	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>		
JUMLAH ASET	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>Rp xxx</u> <u>Rp xxx</u>

Sumber : PSAK No 27 (2009:11)

TABEL IV.4
KOPERASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Behan Pokok	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Partisipasi Beban Pokok Anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga Pokok	(xxx)	(xxx)
Laba (rugi) kotor dengan non anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hsl Usaha Stlh Beban Perkopersian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hsl Usaha Sblm Pos-Pos Luar Biasa	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>

Sumber : PSAK No. 27 (2009:12)

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X0
MANFAAT EKONOMI DARI PMSRN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Pasar	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Jmlh Promosi Ekonomi dari Transaksi Pmsrn Produk Anggt	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BRG UTK ANGGT		
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp xxx	Rp xxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Jmlh Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Aggt	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Kesebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Jmlh Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk Anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Jmlh Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

III.1 Sejarah Singkat Koperasi

KUD Tunas Muda merupakan wadah kegiatan perekonomian pedesaan yang dimiliki oleh warga desa. Melalui koperasi inilah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat, lebih-lebih di daerah transmigrasi yang tingkat perekonomiannya belum stabil.

KUD Tunas Muda dibentuk pada tanggal 06 Agustus 1990 dengan memperoleh penegasan Badan Hukum tanggal 20 Maret 1991 Nomor : 1556 dan diperbaharui tahun 1996 dengan memperoleh Badan Hukum Nomor: 105/BH/PAD.KWK.4/5.I/II/1996, dengan wilayah kerja meliputi Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Keanggotaan koperasi sejak berdiri sampai sekarang berjumlah 419 orang. Modal koperasi diperoleh dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus, Donasi, Cadangan, dan Sisa Hasil Usaha tahun berjalan.

Pertama kali berdiri, KUD Tunas Muda hanya melakukan kegiatan Waserda, Usaha Pupuk dan Usaha Angkutan. Namun karena usaha keras pengurus dan anggota, akhirnya KUD Tunas Muda mengalami banyak peningkatan. Sampai sekarang sudah ada lima unit usaha yang dikelola oleh koperasi, yaitu : Penjualan WASERDA (berbentuk Minimarket), Penjualan

Pupuk, Jasa Angkutan, Jasa Tandan Buah Segar (TBS), Jasa Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Umum.

III.2 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi tersebut.

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan demi mencapai tujuan perusahaan. Organisasi koperasi ini merupakan usaha kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencapai hasil usaha.

Tujuan dari suatu pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat tercapai secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya langkah pertama yang amat penting dalam pengorganisasian ini yang harus dilakukan setelah adanya perencanaan adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Proses perencanaan struktur organisasi menurut gambaran, peraturan, dan pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu dalam struktur organisasi juga harus menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktifitas organisasi yang satu dengan lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan

mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas maka setiap bagian yang ada pada sebuah perusahaan siap melaksanakan tugas yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang mencapai tujuan akhir.

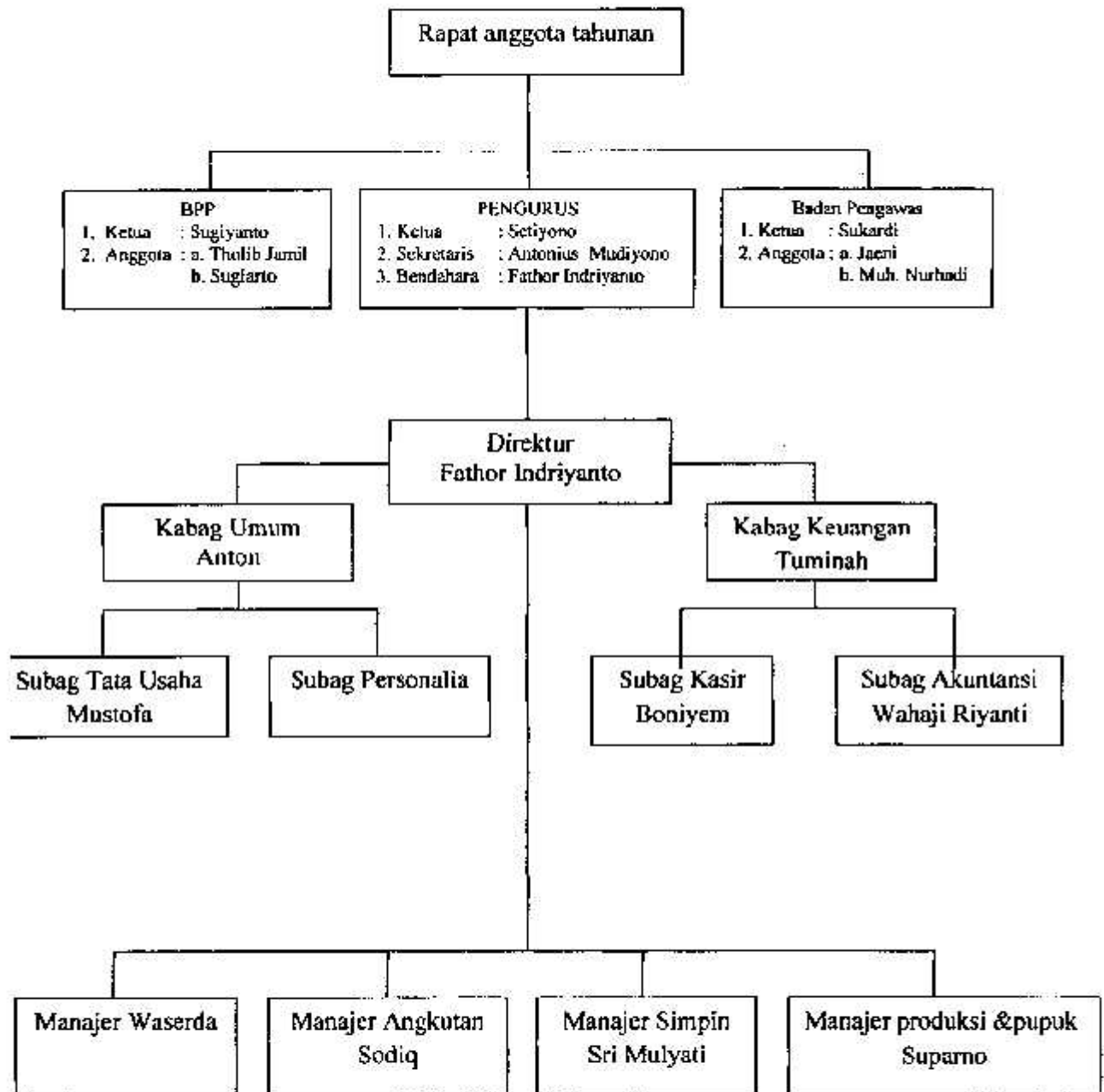
Adapun struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu akan jelas kelihatan jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok pengkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari:

- 1) Rapat anggota, yang merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota.
- 3) Pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Adapun struktur organisasi dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda dapat dilihat pada gambar III.1.

Gambar III.1
Struktur Organisasi KUD Tunas Muda



Dari struktur KUD Tunas Muda dapat diuraikan tugas dan wewenang masing-masing fungsi.

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi operasional koperasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun organisasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir.

Rapat anggota merupakan :

- a. Anggaran Dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus yaitu menerima atau menolak.

2. Badan Pelindung dan Penasehat (BPP)

Badan Pelindung dan Penaschat KUD Tunas Muda dipegang oleh kepala desa di mana tempat KUD Tunas Muda berada. Sehingga segala yang

berhubungan dengan aktifitas koperasi mulai dari tingkat keamanan, letak KUD , dan kesejahteraan anggota atau masyarakat khususnya di Desa Teluk Merbau dan umumnya di Kecamatan Dayun. Selain sebagai pelindung, kepala desa juga memiliki tingkat yang sama dengan pengurus dan badan pegawai KUD Tunas Muda.

3. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus

Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam hal ini pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda terdiri dari :

a. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinir dan membina seluruh karyawan atau pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ketua harus mampu mengelola usaha-usaha di bawah lingkungannya yang meliputi perencanaan, penyelarasan, pengorganisasian, penentuan atau pengarahan dan pengamatan seluruh kegiatan.

b. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab dalam mencatat laporan-laporan perkembangan koperasi yaitu mengenai pelaksanaan administrasi secara teratur seperti membuat laporan tentang daftar anggota, daftar pengurus, daftar badan pemeriksa, notulen rapat, keputusan rapat, anjuran pejabat, anjuran dari instansi lain, saran-saran anggota, saran badan pemeriksa, kejadian penting, serta kegiatan sejenis yang memperlancar administrasi untuk kemajuan koperasi.

c. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab atas segala laporan keuangan koperasi yang meliputi pinjaman anggota dan dana-dana koperasi yang tergolong penerimaan dan pengeluaran koperasi serta mengelola simpanan wajib, pokok dan simpanan sukarela.

4. Badan Pengawas (BP)

Agar KUD Tunas Muda dapat berjalan dengan semestinya, maka selain ada pengurus dan anggota, diperlukan juga suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, lalu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada pemerintah.

5. Direktur

Direktur merupakan seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dibidang usaha, diangkat oleh pengurus dengan berpedoman pada RAT. Direktur KUD Tunas Muda memiliki tugas:

- a. Memimpin pengelolaan usaha KUD
- b. Mengkoordinir kepala unit dan karyawan yang menangani usaha
- c. Menandatangani surat-surat yang menyangkut penawaran jual-beli barang dalam bidang usaha
- d. Mengusulkan kepada pengurus rencana perluasan atau pengembangan usaha dengan alasan yang jelas
- e. Menyusun rencana kegiatan usaha, pemasaran produksi, dan pembiayaan untuk operasional secara terperinci.
- f. Mengusulkan penerimaan, pemberhentian, dan pendidikan khusus karyawan
- g. Bertanggung jawab penuh kepada pengurus.

6. Kabag Umum

Mengatur dan mengawasi hal-hal yang bersifat umum, bagian ini dibagi menjadi:

a. Subag Tata Usaha

Mengatur administrasi-administrasi umum koperasi terhadap para anggota maupun non anggota.

b. Subag Personalia

Bertugas melayani masyarakat yang ingin menjadi anggota dengan menentukan persyaratan yang telah ditentukan.

7. Kabag Keuangan

Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang menyangkut dengan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan normal koperasi, bagian ini di bagi menjadi dua yaitu :

a. Subag Kasir

Kasir berfungsi penerima uang masuk di setiap unit usaha koperasi yang disetorkan setiap hari selesai jam kerja, serta transaksi-transaksi dari jasa koperasi terhadap masyarakat umumnya.

b. Subag Akuntansi

Mencatat transaksi-transaksi keuangan, mulai dari membuat jurnal umum sampai menghasilkan laporan keuangan (Neraca, laporan PHU dan laporan perubahan modal untuk setiap periode) yang diteruskan kepada bendahara, pengurus, untuk di bahas di RAT dan diaudit

8. Manajer Waserda

Bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam pencapaian organisasi. Bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan bahan sembako bagi anggota maupun non anggota. Unit usaha ini berkiprah untuk meningkatkan penjualan, mengadakan persediaan barang yang siap untuk dijual, dan berusaha untuk memperluas jaringan dalam mencari pelanggan baru.

9. Manajer Angkutan

Bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengatur kelancaran dalam pengangkutan tandan buah segar ke tempat pengolahannya dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak, demi kelancaran pengangkutan tandan buah segar ke tempat pengolahan.

10. Manajer Simpin (USP)

Bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan bertugas dalam mengatur proses pemungutan sejumlah uang dari anggota koperasi, kemudian uang yang telah terkumpul disajikan sebagai modal yang dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya serta pada masyarakat pada umumnya yang berkepentingan atas kredit. Dana yang dipungut dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

11. Manajer Produksi & Pupuk

Bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan bertugas dalam mengatur jadwal panen tandan buah segar dan mengatur jadwal pengiriman

tandan buah segar ke tempat pengolahannya, agar penjualan tandan buah segar anggota bisa berjalan dengan lancar.

Bagian ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan pupuk yang diperlukan anggota koperasi dan mengatur rotasi dan jadwal pemupukan setiap kelompok tani.

III. 3 Aktivitas Umum Koperasi

Kegiatan usaha KUD Tunas Muda antara lain :

a. Unit Usaha WASERDA

Dalam unit ini terbagi dua bagian yaitu waserda khusus alat-alat bangunan- pertanian dan waserda yang menjual kebutuhan rumah tangga (minimarket).

b. Unit Usaha Pupuk

Menyediakan pupuk yang diperlukan anggota dengan berbagai merk yang dibutuhkan.

c. Unit Usaha Angkutan TBS

Menyediakan mobil pake up untuk mengangkut barang-barang dagangan dan mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit para anggota dari perkebunan sampai ke tempat pengolahannya.

d. Unit Usaha Umum (Photo Copy)

Menyediakan jasa photo copy bagi anggota dan masyarakat luas.

e. USP (Usaha Simpan Pinjam)

Koperasi Unit Desa Tunas Muda juga memberikan jasa simpan pinjam kepada anggota dan non anggota di mana pengembalian pinjamannya dengan cara diangsur, unit ini bisa juga dikatakan juga lembaga pembiayaan. Alasan

dikatakan demikian karena usaha yang dijalankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

III. 4 Azas dan Tujuan

Adapun azas dan tujuan dari KUD Tunas Muda adalah :

a. Azas KUD Tunas Muda :

Keluargaan dan gotong royong

b. Tujuan KUD Tunas Muda :

- 1) Mengembangkan idiologi kehidupan perkoperasian.
- 2) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.
- 3) Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya, dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

BAR IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. 1 PENGKLASIFIKASIAN PIUTANG

Piutang digolongkan dalam dua katagori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan kredit atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Tetapi dalam PSAK No 27 piutang usaha yang berupa pinjaman uang harus dipisahkan antara pinjaman anggota dan non anggota.

Piutang usaha yang disajikan pada neraca KUD Tunas Muda berasal dari piutang barang dagangan (waserda) dan piutang pinjaman anggota dan non anggota (Usaha Simpan Pinjam). Seluruh piutang lahan kebun yang berjumlah Rp. 2.089.773.024 sebenarnya merupakan piutang pinjaman anggota. Karena dari keterangan petugas koperasi tersebut, piutang lahan kebun adalah uang yang dipinjamkan khusus kepada anggota yang mempunyai niat membeli kebun kelapa sawit guna meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi dalam pengaplikasiannya, KUD Tunas Muda masih melakukan kekeliruan.

Piutang lahan kebun yang berjumlah Rp. 1.593.473.024 telah dimasukkan kedalam piutang dana-dana.

Oleh karena itu jurnal koreksi yang harus dilakukan koperasi atas kesalahan dalam pengklasifikasian piutang adalah sebagai berikut :

<i>Piutang pinjaman anggota</i>	<i>Rp. 1.593.473.024</i>
<i>Piutang dana-dana</i>	<i>Rp. 1.593.473.024</i>

Dengan adanya jurnal koreksi tersebut maka jumlah piutang dana-dana akan menjadi wajar dan tidak terlalu tinggi yaitu menjadi :

$$\text{Rp } 5.426.812.282,30 - \text{Rp } 1.593.473.024,00 = \text{Rp } 3.833.339.258,30$$

IV.2 PENGUKURAN PIUTANG

Pengukuran piutang dagang mencakup kapan piutang dagang diakui dan pada nilai berapa piutang dicatat sehingga jumlah yang dilaporkan adalah jumlah yang wajar. Piutang dagang harus bersih dari perkiraan potongan tunai, ongkos angkut/beban pengiriman barang dan penjualan, serta retur penjualan dan pengurangan harga.

Potongan tunai dimaksudkan untuk mendorong pelanggan membayar hutangnya dengan segera sehingga akan dapat mengurangi resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha. Potongan tunai yang diberikan KUD Tunas Muda terhadap anggota maupun non anggota yang melakukan pembelian kredit dan jangka waktu pembayarannya tidak melebihi 10 hari terhitung sejak tanggal faktur atau tanggal pembelian. Besarnya potongan mencapai 5% atau tergantung persetujuan dua belah pihak. Potongan ini diakui pada tanggal pembayaran, sehingga pada tanggal penjualan perkiraan piutang dagang dan penjualan di catat sebesar nilai bruto. Nilai bruto adalah harga faktur yang belum dikurangkan dengan potongan penjualan atau diskon. Apabila pelanggan membayar pada masa diskon maka koperasi akan mengkreditkan perkiraan penjualan sebesar diskon penjualan yang telah ditentukan.

Setelah melakukan wawancara terhadap bagian waserda, dapat diketahui bahwa potongan penjualan diberikan untuk penjualan barang hangunan. Adapun format jurnal yang dicatat oleh bagian administrasi waserda yaitu :

- a. Saat penjualan barang secara kredit dengan syarat 5/10, n/30 :

<i>Piutang dagang</i>	<i>Rp 3.000.000</i>
<i>Penjualan</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

- b. Jurnal penerimaan pembayaran dalam masa diskon :

<i>Kas</i>	<i>Rp 2.850.000</i>
<i>Penjualan</i>	<i>Rp 150.000</i>
<i>Piutang usaha</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

- c. Jurnal pelunasan setelah masa diskon

<i>Kas</i>	<i>Rp 3.000.000</i>
<i>Piutang usaha</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

Pada saat transaksi penjualan koperasi telah melakukan pencatatan yang benar dengan mencatat piutang usaha dan penjualan sebesar nilai bruto yaitu harga faktur yang belum dikurangkan dari potongan tunai. Tapi potongan tunai yang dimanfaatkan pelanggan oleh koperasi dicatat dengan mendeбет perkiraan penjualan sebesar potongan tunai yang diberikan kepada pelanggan.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa dalam metode bruto potongan tunai dimasukkan pada perkiraan potongan penjualan dan tidak mengurangi penjualan karena penyajiannya dilaporan laba-rugi akan mengurangi penjualan bruto.

Pada transaksi penjualan yang dilakukan KUD Tunas Muda seharusnya pencatatan yang dilakukan jika menggunakan metode bruto adalah :

- a. Saat penjualan barang dagangan dengan syarat 5/10, n/30 dicatat :

<i>Piutang dagang</i>	<i>Rp 3.000.000</i>
<i>Penjualan</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

- b. Jurnal pembayaran dalam masa diskon/potongan tunai dicatat :

<i>Kas</i>	<i>Rp 2.850.000</i>
<i>Potongan penjualan</i>	<i>Rp 150.000</i>
<i> Piutang dagang</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

Perhitungan :

Nilai penjualan :	Rp. 3.000.000,00
Potongan penjualan 5% x 3.000.000,00	Rp. (150.000,00)
<i>Kas</i>	<u><i>Rp. 2.850.000,00</i></u>

- c. Jurnal pelunasan setelah masa diskon, dicatat :

<i>Kas</i>	<i>Rp 3.000.000</i>
<i> Piutang dagang</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

Oleh karena itu jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan koperasi atas kesalahan dalam melakukan pencatatan potongan penjualan adalah sebagai berikut :

- a. Jurnal koreksi untuk mengembalikan saldo normal atas penjualan :

<i>Piutang usaha</i>	<i>Rp 150.000</i>
<i> Penjualan</i>	<i>Rp 150.000</i>

- b. Jurnal koreksi mengakui adanya potongan penjualan

<i>Potongan penjualan</i>	<i>Rp 150.000</i>
<i> Piutang usaha</i>	<i>Rp 150.000</i>

Dengan adanya jurnal koreksi tersebut maka potongan penjualan akan diakui dalam laporan laba-rugi yang akan mengurangi dalam mencari penjualan bersih setiap periode. Sehingga jumlah penjualan akan terlihat lebih material dan sesuai dengan standar laporan keuangan.

IV.3 PENYAJIAN PIUTANG

Piutang merupakan salah satu sumber aliran kas masuk yang digunakan untuk membiayai operasi koperasi dan menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo mendatang. Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda, neraca hanya menyajikan piutang usaha dan piutang dana-dana tanpa memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan non anggota.

Bentuk neraca yang disajikan oleh KUD Tunas Muda adalah:

Tabel IV. 1
KUD TUNAS MUDA
NERACA
Per 31 Desember 2009

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas & Bank	Rp. 1.860.853.408,66
Piutang Usaha	5.230.483.795,35
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(135.600.000,00)
Piutang dana-dana	5.426.812.282,30
Persediaan	653.420.429,71
Pendapatan Ymh. Diterima	15.584.830,00
Jumlah Aktiva Lancar	Rp.13.051.554.746,02

Sumber : Neraca KUD Tunas Muda

Dalam neraca tersebut hanya disajikan rincian piutang :

Piutang usaha : Rp. 5.230.483.795,35

Piutang dana-dana : Rp. 5.426.812.282,30

Dari hasil wawancara dan dari daftar lampiran laporan pertanggungjawaban pengurus, diperoleh informasi bahwa piutang usaha berasal dari piutang WASERDA dan USP. Dalam piutang USP inilah pinjaman diberikan kepada anggota dan bukan anggota koperasi. Adapun rincian piutang tersebut adalah:

1. Piutang Pinjaman Anggota :

Desa Teluk Merbau : Rp. 4.366.146.765,35

Jumlah piutang pinjaman anggota Rp. 4.366.146.765,35

Jadi jurnal koreksi yang perlu dibuat oleh koperasi adalah :

Piutang pinjaman anggota Rp. 4.366.146.765,35

Piutang usaha Rp. 4.366.146.765,35

2. Piutang Pinjaman Non Anggota

Desa Sialang Sakti : Rp. 117.513.887

Desa Dayun : Rp. 2.710.000

Desa Lubuk Tilan : Rp. 223.494.471

Desa Buatan II : Rp. 6.050.000

Desa Sawit Permai : Rp. 60.686.854

Desa Banjar Seminai : Rp. 72.158.041

Desa Ruana Makmur : Rp. 11.666.664

Desa Suka Mulya : Rp. 41.692.952

Desa Pangkalan Makmur : Rp. 31.111.093

Desa PKS : Rp. 10.000.000

Desa Keranji Guguh : Rp. 15.000.000

Desa Berumbung Baru : Rp. 32.353.045

Desa Merangkai : Rp. 21.417.301

Siak : Rp. 2.000.000

Jumlah piutang pinjaman non anggota Rp. 647.854.308

Jurnal koreksinya:

Piutang pinjaman non anggota *Rp. 647.854.308,00*

Piutang usaha *Rp. 647.854.308,00*

Adapun sisanya merupakan piutang bagian waserda yang tidak termasuk pinjaman dari USP, adapun rincian piutang usaha tersebut yaitu:

1. Piutang Waserda (BS) : *Rp. 110.806.900,00*

2. Piutang Waserda (GT) : *Rp. 105.675.822,00*

Jumlah piutang usaha *Rp 216.482.722,00*

Seharusnya menurut PSAK No.27 piutang yang terjadi sehubungan dengan transaksi kepada anggota dan non anggota disajikan terpisah di neraca. Tujuan pemisahan ini agar para anggota dan para pemakai laporan keuangan dapat menilai manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi dan dapat mengukur kinerja atau efesiensi kegiatan koperasi, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan koperasi.

Penyajian piutang seharusnya dapat dilihat pada pada tabel IV.2

Tabel IV. 2
KUD TUNAS MUDA
NERACA

Per 31 Desember 2009

AKTIVA		KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	
Aktiva Lancar		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Bank	Rp. 1.860.853.408,66	Simpanan Anggota	Rp 5.043.223.943,96
Piutang Usaha	216.482.722,00	Hutang Barang	315.222.520,00
Piutang pinjaman anggota	5.959.619.789,35	Hutang Bukopin	0,00
Piutang pinjaman non anggota	647.854.308,00	SHU Bhg Anggota	394.066.466,54
Piutang dana-dana	3.833.339.258,30	Hutang Dana-Dana SHU	80.685.759,20
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(135.600.000,00)	Hutang Dana-Dana Lainnya	2.400.063.723,98
Persediaan	653.420.429,71	Biaya Ymh. Dibayar	305.260.480,00
Pendapatan Ymh. Diterima	15.584.830,00	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp 8.538.524.893,68
Jumlah Aktiva Lancar	Rp.13.051.554.746,02		
PENYERTAAN		KEWAJIBAN JK. PANJANG	
Simpanan pada PUSKUD	Rp 1.320.000,00	Hutang BBM	Rp 100.000.000,00
Pada Entitas Lain	0,00	Jumlah Kwjbn Jk. Pnjg	Rp 100.000.000,00
Jumlah Penyertaan	Rp 1.320.000,00	Jumlah Kewajiban	Rp 8.638.524.893,68
AKTIVA TETAP- Setelah		KEKAYAAN BERSIH	
Dikurangi Akk. Penyusutan	Rp 790.426.469,79	Simpanan Pokok	Rp 4.270.000,00
AKTIVA LAIN-LAIN	Rp 26.250.000,00	Simpanan Wajib	90.076.000,00
		Simpanan Wajib Khusus	3.248.427.799,00
		Cadangan	1.580.080.424,96
		Donasi	11.800.000,00
		SHU Tahun Berjalan	296.372.098,17
		Jumlah Kekayaan Bersih	Rp 5.231.026.322,13
JUMLAH AKTIVA	Rp 13.869.551.215,81	JUMLAH KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	Rp 13.869.551.215,81

Sumber : Data Olahan, 2011

TABEL IV.4
KUD TUNAS MUDA
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

PARTISIPASI ANGGOTA	
Partisipasi Bruto Anggota	Rp 3.933.495.992,61
Beban Pokok	<u>(2.273.112.891,01)</u>
Partisipasi Beban Pokok Anggota	<u>Rp 1.660.383.101,60</u>
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA	
Penjualan	Rp 309.757.505,00
Harga Pokok	<u>(179.004.575,00)</u>
Laba (rugi) kotor dengan non anggota	<u>Rp 130.752.930,00</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	
BEBAN OPERASI	
Beban Usaha	<u>(486.777.324,89)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	<u>Rp 1.304.358.706,71</u>
Beban Perkoperasian	<u>(50.000.000,00)</u>
Sisa Hsl Usaha Sthl Beban Perkopersian	<u>Rp 1.254.358.706,71</u>
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>(964.831.345,95)</u>
Sisa Hsl Usaha Sblm Pos-Pos Luar Biasa	<u>Rp 289.527.360,76</u>
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>(51.707.335,41)</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	<u>Rp 341.234.696,17</u>
Pajak Penghasilan	<u>(44.862.598,00)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp 296.372.098,17</u>

Sumber : Data Olahan, 2011

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis berusaha mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak KUD Tunas Muda.

V.1 KESIMPULAN

1. Jenis piutang yang ada dalam KUD Tunas Muda digolongkan menjadi piutang usaha dan piutang dana-dana. Namun sebagian dari piutang lahan kebun dimasukkan ke dalam piutang dana-dana, padahal menurut keterangan petugas seluruh piutang lahan kebun merupakan kegiatan normal koperasi yaitu piutang yang diberikan pada anggota khusus pembelian lahan kebun kelapa sawit guna meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dimana harus ada pengklasifikasian yang jelas.
2. Dalam pengukuran piutang usaha pada KUD Tunas Muda dipengaruhi oleh potongan tunai. Potongan tunai dicatat dengan menggunakan metode kotor/bruto yaitu mencatat piutang yang terjadi dengan jumlah kotor sebelum dikurangi potongan tunai yang mungkin dimanfaatkan pembeli. Dalam hal ini potongan hanya diakui dan dicatat jika pelanggan benar-benar memanfaatkannya. Pada akhir periode akuntansi koperasi tidak

membuat taksiran berapa besar potongan yang mungkin dimanfaatkan pembeli. Sehingga jumlah piutang yang disajikan bukanlah jumlah yang wajar karena dalam jumlah tersebut belum dikurangi dengan potongan tunai atas piutang usaha yang belum berakhir masa potongannya pada akhir periode akuntansi.

3. Dalam penyajian piutang di neraca, KUD Tunas Muda tidak memisahkan antara piutang yang berasal dari transaksi dengan anggota dan piutang yang berasal dari transaksi dengan non anggota. Koperasi hanya mencatatnya sebagai piutang usaha saja. Padahal piutang (USP) yang diberikan tidak hanya untuk penduduk Desa Teluk Merbau, tetapi juga diberikan kepada masyarakat desa-desa lainnya. Penyajian piutang yang seperti itu tidak sesuai dengan format Neraca dan PHU yang telah di contohkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 27.

V.2 SARAN

1. Dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan piutang harus sesuai dengan SAK. Sebaiknya koperasi bisa lebih teliti dan terarah dalam memisahkan piutang tersebut menurut sumber terjadinya, yaitu piutang yang berasal dari kegiatan utama koperasi/kegiatan penjualan kredit barang dagangan disajikan ke dalam piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota. Maupun piutang di luar kegiatan normal perusahaan yaitu piutang lain-lain dan piutang dana-dana.
2. Dalam hal pengukuran piutang usaha untuk potongan tunai dengan metode bruto/kotor, seharusnya pada akhir periode akuntansi, koperasi membuat

taksiran kemungkinan potongan tunai atas transaksi penjualan yang belum habis masa potongannya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang belum habis masa potongannya pada periode akuntansi berikutnya. Sehingga jumlah yang disajikan di neraca sejumlah nilai yang wajar/dapat ditagih

3. Dalam hal penyajian piutang di neraca harus jelas sesuai dengan Format PSAK No.27, yang mana neraca harus menyajikan piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota secara terpisah. Hal ini dilakukan agar semua anggota koperasi dapat menilai manfaat dengan menjadi anggota dan dapat mengukur kinerja atau efesiensi kegiatan koperasi.
4. Agar laporan keuangan yang disajikan lebih baik, seharusnya pihak koperasi meningkatkan SDM dengan menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing dan memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Al-Baqarah : 282
- Baridwan, Zaki, 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Carls, S. Warren. Philip, E. Fish. 2005. *Pengantar Akuntansi*, Penerjemah Aria Farahmita, Taufik Hendrawan, Edisi Dua Puluh Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Fraser, Lyn M, Aileen Ormiston, 2008. *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi Ketujuh, Penerbit Indeks
- Goerge H, Bodnar, 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedelapan, Jilid Satu, Penerbit PT. INDEKS, Kelompok Gramedia.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2005. *Teori Akuntansi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hornigren, Charles T dan Walter T. Harrison Jr, 2007. *Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- IAI, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jasmina, 2008. *Pengantar Akuntansi*, Penerbit Suska Press, Pekanbaru
- Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kieso, Donald E, dan Jerry J. Weygand, 2002. *Akuntansi Intermediate*, Penerjemah Emil Salim, Edisi Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kusnadi, Lukman Syamsudin dan Kertahadi, 2003. *Teori Akuntansi*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.
- M. Nafarin, 2004. *Akuntansi Pendekatan Siklus dan Pajak Perusahaan Industri dan Dagang*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nainggolan, Pahala, 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi*, Penerbit PPM, Jakarta
- Nartikarois, 2009. *Perlakuan Akuntansi Piutang pada UED Lembah Subur Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Sengingi*, Pekanbaru
- Reeve, James M, dkk, 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Buku 1, Penerjemah Damayanti Dian, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Rudianto, 2009. *Pengantar Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Sadeli, Lili M, 2002. *Teori Akuntansi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Skousen, K. Fed Albrecht, W. Steve Stice, D. James Stice, K.Ear, 2001. *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama, Penerjemah Thonison Learning, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarsono, 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002. *Akuntansi Untuk Koperasi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Umar, Husein, 2003. *Riset Akuntansi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yaya, Rizal, dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta